

**PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH OLEH
DINAS PERTANIAN KOTA SURABAYA**

**(Studi Kasus pada UKM Makanan dan Minuman di
Ekowisata Hutan Mangrove Wonorejo Surabaya)**

Dani Rendra Lesmana Putra

S1 Ilmu Administrasi Negara. FIS. UNESA (rendradani@gmail.com)

Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tiap daerah. Upaya pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui sektor pariwisata dan sumber daya alam lokal yang dimiliki di setiap daerah. Salah satunya ekowisata hutan mangrove di Kelurahan Wonorejo Surabaya. Kawasan ini sangat strategis untuk dikembangkan dalam bidang wisata demi membangun perekonomian dan menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar karena masyarakat dapat mendirikan beberapa UKM sehingga dapat menambah penghasilan dan menciptakan lapangan kerja baru.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) oleh Dinas Pertanian pada UKM makanan dan minuman di ekowisata hutan mangrove Wonorejo Surabaya. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari beberapa informan dan lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan UKM di ekowisata hutan mangrove Wonorejo dilihat dari aspek pemungkinan yakni masyarakat kini dapat tambahan penghasilan dengan berjualan makanan dan minuman bagi para pengunjung, aspek penguatan yakni dilakukan dengan pemberian pelatihan pemasaran kepada pelaku UKM, aspek perlindungan yakni perlindungan berupa perda yang melindungi kawasan hutan mangrove dari kegiatan pembangunan perumahan, aspek penyokongan yakni melalui pasar murah yang membantu pelaku UKM agar produknya lebih dikenal oleh masyarakat, aspek pemeliharaan yakni memberikan sosialisasi dan pelatihan supaya masyarakat dapat lebih merawat dan memelihara hutan mangrove karena dapat memberikan mereka sumber penghasilan.

Kata kunci : Usaha Kecil Menengah, Pemberdayaan

**EMPOWERMENT SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES BY
DEPARTMENT OF AGRICULTURE CITY OF SURABAYA**

(Case Study at SME Food and Drink in Mangrove

Forests Ecotourism Wonorejo Surabaya)

Dani Rendra Lesmana Putra

S1 Ilmu Administrasi Negara. FIS. UNESA (rendradani@gmail.com)

Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP

Abstract

Community empowerment is one of the efforts by the government in increase public welfare in each region. Efforts to empower can through the tourism sector and natural resources local owned in each region. One of them mangrove forests ecotourism in Wonorejo Surabaya. This area is very strategic to be developed in the field tourism to build economy and support public welfare around because the community can establish some SMEs (Small and Medium Enterprises) in order to add income and create new jobs.

The purpose of this research was to know of empowerment Small and Medium Enterprises by the department of agriculture at SMEs food and drink in mangrove forests ecotourism Wonorejo Surabaya. The approach of research this is research descriptive with approach qualitative. A sources of the data used consisting of several informants and research sites. Data collection technique used namely interview, observation and documentation. Data analysis technique through data collection, the reduction of the data, presentation of the data, and conclusion/verification.

The result showed that the empowerment SMEs in mangrove forests ecotourism Wonorejo viewed from possible aspect is the community can now additional income by selling food and drink of visitors, strengthening aspect is the done with the giving marketing training to SMEs practitioners, protection aspect is protection in form of by law that protects mangrove forests area of housing development activities, support aspect is through the cheap market help SMEs practitioners that their product more known by the community, maintenance aspect is provide socialization that people can more care and maintain mangrove forests because it could give them a source of income.

Keywords: Small and Medium Enterprises, Empowerment

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Kecil Menengah (UKM) diyakini memiliki nilai strategis dalam perekonomian nasional dan merupakan bagian dari sandaran pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu wahana yang paling efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat yaitu melalui pemberdayaan kepada para usaha kecil menengah. Hal tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 1 ayat (8) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil menengah mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pemberdayaan kepada usaha kecil menengah dapat dilakukan melalui banyak sektor, yang salah satunya yaitu sektor pariwisata yang mengandalkan potensi sumber daya alam sebagai acuannya. Saat ini pemerintah maupun masyarakat telah banyak memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kegiatan pariwisata, karena saat ini wisata alam banyak digandrungi oleh masyarakat. Hal ini tentunya juga akan menambah penghasilan bagi penduduk sekitar, dan tidak sedikit pula masyarakat yang telah bergantung kepada potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahkan pemerintah juga ikut membantu memberdayakan mereka melalui potensi sumber daya alam tersebut.

Salah satu lokasi yang memiliki potensi sumber daya alam untuk kegiatan pariwisata adalah di Kelurahan Wonorejo, di tempat tersebut terdapat potensi hutan

mangrove yang dimanfaatkan sebagai lokasi ekowisata yaitu sebagai potensi pariwisata sekaligus kegiatan pelestarian dan konservasi alam sehingga banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Melihat adanya peluang tersebut, akhirnya masyarakat Wonorejo berinisiatif untuk membentuk Usaha Kecil Menengah (UKM).

Pembentukan UKM di ekowisata hutan mangrove Wonorejo membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat dari pembentukan UKM ini yaitu dapat memberikan mereka penghasilan dari para wisatawan yang datang.

Keberadaan UKM merupakan salah satu usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional sehingga dapat menjadi wadah yang baik dalam menciptakan lapangan pekerjaan. UKM merupakan usaha yang bersifat padat karya yang tidak menuntut persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian dan penggunaan modal usaha yang relatif sedikit serta teknologi yang digunakan juga cenderung sederhana.

Pendirian UKM juga merupakan upaya kreatif dari masyarakat yang masih perlu dikembangkan. Mengingat UKM merupakan salah satu potensi usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tiap daerah, maka keinginan untuk memberdayakan UKM merupakan upaya dari Pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dan mensejahterakan masyarakatnya khususnya melalui sektor pariwisata.

Namun upaya pemberdayaan tersebut tidak selalu berjalan dengan baik karena saat ini para pengusaha sudah mulai menempati sekitar kawasan tersebut sebagai lahan bisnis perumahan karena lokasinya yang masih cukup luas dan cukup strategis untuk mengembangkan bisnis mereka karena masih berada di lingkungan Kota Surabaya. Pembangunan perumahan ini dirasa dapat mengganggu kenyamanan wisatawan dan masyarakat sekitar karena truk-truk materialnya melewati jalan Wonorejo setiap hari

(www.antarajatim.com/lihat/berita/154963/p-embangunan-perumahan-di-wonorejo-mengganggu-wisatawan).

Pengembangan perumahan di sekitar kawasan mangrove Wonorejo dirasa telah menggerus lahan di wilayah tersebut. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 3 tahun 2007 tentang Rencana tata ruang wilayah Kota Surabaya dalam pasal 36 yang menjelaskan bahwa penetapan kawasan lindung wilayah laut bertujuan untuk melindungi lingkungan, potensi dan sumber daya yang berada di wilayah pesisir dan perairan laut dari usaha atau kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan terjadinya kerusakan atau pencemaran laut. Pada kawasan lindung wilayah laut dilarang melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan wilayah laut. Kawasan lindung wilayah laut meliputi: kawasan lindung konservasi laut, dan kawasan lindung mangrove.

Namun saat ini kawasan tersebut banyak dibangun perumahan, tambak-tambak petani sudah dipasang tanda dijual. Berkurangnya lahan di Wonorejo diakui oleh para petani tambak di Wonorejo. Mereka mengaku sudah banyak pengembang yang menawarkan para petani tambak untuk menjual lahan mereka. Akan tetapi jika tuntutan kehidupan memaksa, bisa saja mereka menjual lahan mereka kepada pengembang perumahan

(<http://koranopini.com/item/3623-lahan-konservasi-wonorejo-digerus-perumahan>).

Namun tidak hanya masalah pengembangan perumahan saja, masalah akses jalan yang masih rusak dan belum diperbaiki dapat menjadi kendala akses menuju ke ekowisata hutan mangrove. Karena hal ini dirasa akan menyulitkan para wisatawan yang akan berkunjung. Hal ini tentunya berdampak negatif bagi masyarakat khususnya bagi para pelaku UKM, karena penghasilan yang mereka dapatkan juga berasal dari banyaknya para pengunjung yang datang. Padahal jika mampu dimanfaatkan dan dilestarikan dengan efektif maka hutan mangrove akan menghasilkan banyak manfaat bagi banyak pihak khususnya bagi masyarakat sekitar.

Melihat kondisi tersebut, perlu peran dari pemerintah khususnya Dinas Pertanian Kota Surabaya dalam mengupayakan pemberdayaan UKM di ekowisata hutan mangrove Wonorejo. Mengingat Dinas Pertanian merupakan pihak yang menaungi para pelaku UKM dan perannya sangatlah dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya yang berstudi kasus pada UKM makanan dan minuman di ekowisata hutan mangrove Wonorejo Surabaya”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimanakah Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah oleh Dinas Pertanian pada UKM Makanan dan Minuman di Ekowisata Hutan Mangrove Wonorejo Surabaya?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: “Mendeskripsikan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah oleh Dinas Pertanian pada UKM Makanan dan Minuman di Ekowisata Hutan Mangrove Wonorejo Surabaya”.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan akan memperkaya kajian bidang studi Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan Studi Masalah Pembangunan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa khususnya dalam bidang pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam pemberdayaan UKM, guna sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat.

b. Bagi Universitas Negeri Surabaya

Dapat memperkaya dan memperbanyak informasi di bidang kajian ilmu administrasi negara yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat khususnya di Universitas Negeri Surabaya.

c. Bagi Dinas/Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi pihak Dinas Pertanian Kota Surabaya dalam hal mengidentifikasi masalah yang dihadapi serta memberikan bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat.

d. Bagi Masyarakat/pelaku UKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam terkait upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat khususnya pemberdayaan UKM.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Mardikanto (2012:27-29), Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan dan memandirikan masyarakat.

Sedangkan menurut Suharto (2010:57), Pemberdayaan secara konseptual berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Kekuasaan seringkali dianggap sebagai kemampuan seseorang untuk melakukan apa yang kita inginkan, sedangkan pemberdayaan dianggap sebagai kemampuan seseorang khususnya pada kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kebebasan.

Menurut Mardikanto (2012:31) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang

dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

2. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Mardikanto (2012:111-112), pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat yang merujuk pada upaya perbaikan terutama perbaikan mutu hidup manusia, baik secara fisik, ekonomi maupun sosial budaya.

Tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan yaitu sebagai berikut:

a. Perbaikan Pendidikan

Dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik yaitu perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

b. Perbaikan Aksesibilitas

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, terutama tentang aksesibilitas melalui sumber informasi dan inovasi.

c. Perbaikan Tindakan

Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang lebih baik.

d. Perbaikan Kelembagaan

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

3. Lingkup Kegiatan Pemberdayaan

Menurut Mardikanto (2012:113-117) Lingkup kegiatan Pemberdayaan terdiri dari: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan.

a. Bina Manusia

Lingkup pemberdayaan dalam bina manusia difokuskan kepada 2 hal yaitu:

1. Upaya peningkatan kemampuan masyarakat

2. Upaya peningkatan posisi tawar masyarakat

b. Bina Usaha

Bina Usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal, seperti:

1. peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk.
2. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring kemitraan.
3. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal.
4. Peningkatan aksesibilitas terhadap: modal, pasar, dan informasi.

c. Bina Lingkungan

Pembangunan telah membawa dampak negatif sebagai pencemaran lingkungan akibat dari adanya limbah industri dan rumah tangga. Menghadapi kegiatan tersebut, upaya pemberdayaan terhadap kesadaran lingkungan (sumber daya alam dan lingkungan hidup) sudah saatnya memperoleh perhatian yang serius.

d. Bina Kelembagaan

Bina Kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi yang jauh lebih penting adalah seberapa jauh kelembagaan yang telah dibentuk itu telah berfungsi secara efektif.

4. Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P yaitu: Pemungkinan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto, 2010:67-68).

a. Pemungkinan

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-

- sekat cultural dan structural yang menghambat.
- b. Penguatan
Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
 - c. Perlindungan
Melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
 - d. Penyokongan
Memberikan bimbingan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
 - e. Pemeliharaan
Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

5. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan sebuah proses yang berkesinambungan seperti yang dikemukakan oleh Adi (2008:244-258) bahwa sebuah pemberdayaan berlangsung melalui tujuh tahap program pemberdayaan, meliputi:

- a. Tahap persiapan (engagement)
- b. Tahap pengkajian (assessment)
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan (designing)
- d. Tahap formulasi
- e. Tahap pelaksanaan program
- f. Tahap evaluasi
- g. Tahap terminasi (disengaged)

B. Usaha Kecil Menengah

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UKM adalah jenis usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia, tetapi sampai saat ini batasan mengenai usaha kecil di Indonesia masih beragam.

Pengertian kecil didalam usaha kecil bersifat relatif, sehingga perlu ada batasannya yang dapat menimbulkan definisi-definisi usaha kecil dari berbagai segi. Kondisi umum UKM di Indonesia dapat digambarkan dari populasi tahun 2007 terdapat 49,8 juta unit usaha yaitu sama dengan 99,9% jumlah unit usaha di Indonesia. Sedangkan penyerapan tenaga kerja = 88,7 juta yaitu sama dengan 96,9% dari seluruh tenaga kerja Indonesia (www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdfprosiding2/fisip201240.pdf).

Sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, UKM harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tersebut, yang diwujudkan melalui pemberdayaan UKM. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

C. Pengertian Ekowisata

Pada hakekatnya pengertian ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung

jawab terhadap kelestarian area yang masih alami (*Natural area*), memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Atas dasar pengertian ini, bentuk ekowisata pada dasarnya merupakan bentuk gerakan konservasi yang dilakukan oleh penduduk dunia (Anonim, 2004:12).

Definisi ekowisata yang pertama diperkenalkan oleh organisasi *The Ecotourism Society* yaitu sebagai berikut: Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Semula ekowisata dilakukan oleh wisatawan pecinta alam yang menginginkan di daerah tujuan wisata tetap utuh dan lestari, disamping budaya dan kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga.

Namun dalam perkembangannya ternyata bentuk ekowisata ini berkembang karena banyak digemari oleh wisatawan, wisatawan ingin berkunjung ke area alami dan dapat menciptakan bisnis. Kemudian ekowisata didefinisikan sebagai berikut: Ekowisata adalah bentuk baru dari perjalanan bertanggung jawab ke area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industri pariwisata. Berdasarkan kedua definisi ini dapat dimengerti bahwa dunia ekowisata telah berkembang sangat pesat (Anonim, 2004:13).

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kantor Dinas Pertanian Kota Surabaya. Sementara itu, fokus penelitian ini adalah pemberdayaan usaha kecil menengah oleh dinas pertanian kota Surabaya yang dilihat dengan pendekatan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Suharto (Suharto, 2010). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan data model interaktif dari Miles dan Hubberman.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Dinas Pertanian Kota Surabaya

Berdasarkan Visi dan Misi dari Dinas Pertanian Kota Surabaya, dijelaskan bahwa Visi Dinas Pertanian adalah *Menjadi inovator di bidang Kelautan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Pertanian*. Sedangkan Misi Dinas Pertanian adalah *Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan menumbuhkan kembangkan kewirausahaan*. Dalam melaksanakan tugasnya, maka Dinas Pertanian Kota Surabaya mempunyai tugas dalam mengelola sumber daya alam lokal yang dimiliki dan membentuk serta memberdayakan UKM.

2. Profil Ekowisata Hutan Mangrove Wonorejo Surabaya

Hutan mangrove tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, yang salah satunya ada di kota Surabaya yang dikenal dengan nama Ekowisata Hutan Mangrove Wonorejo. Kawasan ini sangat strategis untuk dikembangkan dalam bidang wisata demi membangun perekonomian dan menunjang kesejahteraan masyarakat sekitar. Ekowisata mangrove ini juga merupakan salah satu tempat wisata yang sudah menjadi ikon Kota Surabaya di mata wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Surabaya. Sebab kota ini mampu menyimpan potensi wisata penyelamat lingkungan walaupun dikenal sebagai kota terbesar kedua di Indonesia.

Lokasi ekowisata mangrove terletak di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya tepatnya di Jalan Raya Wonorejo Nomor 1 Rungkut Surabaya. Kawasan ini berada di lahan seluas 871 hektar. Ekowisata Mangrove Wonorejo mempunyai jarak tempuh dari pusat kota Surabaya sejauh 3 km.

Ekowisata Mangrove Wonorejo termasuk dalam kawasan hutan mangrove Pamurbaya atau Pantai Timur Surabaya yang pertama kali diprakarsai oleh Camat Rungkut, Lurah Wonorejo beserta FKPM serta disahkan dengan Surat Keputusan Lurah Wonorejo nomor: 556/157/436.11.15.5/2009 pada tanggal 1 Juli 2009 dan kemudian diresmikan oleh Walikota Surabaya yaitu Drs. Bambang DH pada tanggal 9 Agustus 2009.

B. Gambaran Pemberdayaan UKM oleh Dinas Pertanian Kota Surabaya (Studi Kasus pada UKM Makanan dan Minuman di Ekowisata Hutan Mangrove Wonorejo Surabaya)

Dinas Pertanian Kota Surabaya melakukan pemberdayaan masyarakat di Ekowisata Hutan Mangrove Kelurahan Wonorejo dalam upaya memberdayakan UKM makanan dan minuman. Masalah yang dihadapi oleh UKM mereka adalah sehubungan dengan akses jalan, karena akses jalan menuju ekowisata hutan mangrove yang buruk dapat menimbulkan masalah tersendiri bagi masyarakat karena hal tersebut dirasa dapat menyulitkan wisatawan yang berkunjung. Hal ini tentunya berdampak negatif bagi masyarakat khususnya bagi para pelaku UKM, karena penghasilan yang mereka dapatkan juga berasal dari banyaknya para pengunjung yang datang.

Masalah yang dihadapi oleh masyarakat Wonorejo juga terkait pengalihan lahan. Saat ini jumlah lahan hutan mangrove di Wonorejo semakin berkurang akibat adanya pengalihan lahan mangrove yang sekarang berubah menjadi kawasan perumahan. Padahal hutan mangrove Wonorejo merupakan kawasan wisata alam yang seharusnya dijaga kelestariannya. Untuk itu perlu adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan juga Dinas Pertanian dalam mengatasi hal tersebut. Mengingat Dinas Pertanian merupakan dinas yang menaungi ekowisata hutan mangrove dan juga para pelaku UKM.

C. Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh dari para pelaku UKM, di dalam ekowisata hutan mangrove sendiri terdapat berbagai UKM. Para pelaku UKM tersebut merupakan masyarakat dari Kelurahan Wonorejo sendiri. Mereka memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal yang dimiliki yakni hutan mangrove yang dapat menjadi peluang wisata bagi masyarakat lokal maupun mancanegara, sehingga dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat sekitar.

Untuk mengetahui pembahasan atas hasil analisis tentang bagaimana pemberdayaan UKM di ekowisata hutan mangrove, maka peneliti menggunakan teori 5P dari Suharto (2010:67-68) tentang pendekatan

pemberdayaan yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan, lebih jelasnya 5 pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemungkinan

Pemungkinan yang dimaksudkan adalah menciptakan kondisi dimana masyarakat dapat berkembang yaitu dengan membentuk suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah setempat supaya ekowisata hutan mangrove dapat menjadi ikon wisata di Surabaya dan banyak di kunjungi oleh wisatawan.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya, menunjukkan bahwa peresmian dan pembangunan fasilitas di ekowisata hutan mangrove dapat mendatangkan wisatawan agar berkunjung ke ekowisata hutan mangrove. Dengan melihat adanya peluang tersebut, masyarakat Wonorejo berinisiatif untuk mendirikan UKM sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya masyarakat di Kelurahan Wonorejo.

Pengembangan ekowisata mangrove Wonorejo juga telah banyak memberikan perubahan bagi masyarakat sekitar, masyarakat yang sebelumnya sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, kini dapat tambahan penghasilan dengan memanfaatkan potensi hutan mangrove sebagai acuannya.

Namun akses jalan yang masih rusak dan sepi jumlah pengunjung yang datang menjadi kendala yang dialami oleh mereka, memang akses jalannya sudah diperbaiki, namun hal itu hanya untuk menuju ke perumahan saja. Mereka mengeluhkan hal tersebut karena nantinya bakal menyulitkan wisatawan yang akan mengunjungi ekowisata hutan mangrove.

2. Penguatan

Penguatan dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki masyarakat karena para pelaku UKM masih belum memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam hal manajemen usaha dan pemasaran. Menanggapi permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UKM, Dinas Pertanian memberikan penguatan kepada mereka yaitu

dengan cara memberikan berbagai macam pelatihan dan sosialisasi.

Pelatihan yang diberikan yakni pelatihan pemasaran produk mereka atau pelatihan dagang. Pelatihan ini dimaksudkan supaya para pelaku UKM dapat mengetahui bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik agar pelanggan tertarik sehingga dapat membeli produk mereka.

Namun pihak Dinas Pertanian tidak memberikan bantuan berupa modal usaha kepada pelaku UKM. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, Ibu Nasirah mengatakan bahwa beliau mendapatkan modal usaha dari meminjam dana dari koperasi simpan pinjam yang ada di daerah Wonorejo.

Selain pelatihan usaha, Dinas Pertanian juga memberikan pelatihan dalam bentuk pemeliharaan ekowisata hutan mangrove melalui kegiatan penanaman dan pembibitan mangrove, karena dirasa ekosistem hutan mangrove saat ini sudah mulai berkurang akibat banyaknya pohon mangrove yang mati dan juga akibat pengalihan lahan hutan mangrove menjadi kawasan perumahan.

Oleh karena itu perlu adanya kegiatan promosi dan himbauan supaya masyarakat dapat lebih tau tentang fungsi hutan mangrove sehingga dapat lebih memelihara sekaligus mengembangkan ekowisata mangrove Wonorejo.

3. Perlindungan

Bentuk perlindungan dari pemerintah ini diberikan agar pelaku UKM dapat merasa aman dan nyaman serta terlindungi dari ancaman pihak luar. Perlindungan ini diberikan agar tidak terjadi diskriminasi antar pedagang dari persaingan yang tidak sehat.

Bentuk perlindungan yang diberikan yakni melalui FKPM, yaitu suatu badan yang melindungi hutan mangrove dari upaya penebangan liar yang sekaligus juga melindungi para pelaku UKM agar tidak terganggu oleh pedagang lainnya.

Suatu bentuk pengawasan dan evaluasi juga diperlukan agar para pelaku UKM dapat menjalankan usahanya dengan baik dan lancar. Karena mengingat bahwa

para pesaing usaha juga sudah mulai berdagang di depan area pintu masuk ekowisata hutan mangrove, yang padahal hal tersebut telah melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Upaya perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pertanian terhadap permasalahan pembangunan perumahan di sekitar lahan konservasi mangrove Wonorejo yakni berupa perda. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, Ibu Nia selaku Staf Bidang Kehutanan mengatakan bahwa perda diperlukan untuk menindak tegas para pengembang perumahan apabila pembangunan perumahan tersebut melanggar aturan atau pembangunannya sudah melebihi dan sampai di batas kawasan konservasi.

4. Penyokongan

Penyokongan yang diberikan oleh Dinas Pertanian kepada pelaku UKM yakni melalui kegiatan pasar murah yang diselenggarakan di sekitar ekowisata hutan mangrove. Kegiatan pasar murah ini bertujuan untuk membantu para pelaku UKM agar dapat memasarkan produknya supaya lebih dikenal oleh masyarakat.

Tidak hanya dukungan melalui kegiatan pasar murah, Dinas Pertanian juga memberikan bantuan dengan cara membangun atau memberikan tempat usaha bagi para pelaku UKM. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat Wonorejo yang ingin membuka usaha namun tidak mempunyai biaya untuk membangun tempat usaha, bentuk bantuan ini diberikan sebagai upaya dari Dinas Pertanian agar masyarakat dapat tambahan penghasilan dan mampu hidup mandiri dengan membentuk UKM tersebut.

5. Pemeliharaan

Bentuk pemeliharaan dapat berupa upaya tindak lanjut yang dilakukan dengan cara melakukan promosi mengenai ekowisata mangrove wonorejo, karena bila kawasan ini makin maju maka pengunjungnya akan makin banyak sehingga dapat memberikan dampak positif bagi para pelaku UKM.

Pemeliharaan juga dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk menjaga kondisi agar tetap kondusif yakni dengan memberikan

sosialisasi supaya masyarakat dapat lebih merawat dan lebih mencintai hutan mangrove, karena hutan mangrove juga merupakan sumber penghasilan bagi kehidupan mereka.

Berdasarkan hasil pemaparan sebelumnya Ibu Nia selaku Staf Bidang Kehutanan mengatakan bahwa untuk menjaga kondisi yang kondusif masyarakat diberikan sosialisasi mengenai cara menanam dan pembibitan pohon mangrove supaya ekosistem hutan mangrove dapat terus bertambah dan terhindar dari pengrusakan.

Berdasarkan hasil observasi sebelumnya Ibu Nia selaku Staf Bidang Kehutanan juga mengatakan bahwa untuk memberdayakan masyarakat di Wonorejo, Dinas Pertanian melibatkan penduduk sekitar dalam membentuk UKM-UKM tersebut dan juga berkeinginan supaya para pelaku UKM lebih dapat memasarkan produknya agar usaha mereka dapat lebih maju melalui kegiatan pelatihan yang telah diberikan sebelumnya.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan data yang diperoleh dan melihat tujuan dilakukannya penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan UKM makanan dan minuman oleh Dinas Pertanian di ekowisata hutan mangrove dapat dilihat dari lima pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu melalui aspek pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

1. Pada aspek pemungkinan dilakukan dengan meresmikan dan membangun beberapa fasilitas di ekowisata hutan mangrove sehingga dapat mendatangkan wisatawan agar berkunjung ke ekowisata hutan mangrove. Dengan melihat adanya peluang tersebut, masyarakat Wonorejo lalu berinisiatif untuk mendirikan UKM sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kelurahan Wonorejo.
2. Pada aspek penguatan dilakukan dengan pemberian pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan pemasaran. Pelatihan ini sangatlah membantu para pelaku UKM supaya mereka dapat mengetahui

bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik sehingga pelanggan tertarik dan membeli produk mereka.

3. Pada aspek perlindungan yakni memberikan perlindungan melalui FKPM. Yaitu untuk melindungi para pelaku UKM agar mereka dapat merasa aman dan nyaman dalam menjalankan usaha serta dari gangguan yang tidak diinginkan. Dan juga perlindungan berupa perda yang melindungi kawasan hutan mangrove dari kegiatan pengalihan lahan termasuk kegiatan pembangunan perumahan.
4. Aspek penyokongan yang diberikan oleh Dinas Pertanian yakni memberikan dukungan melalui kegiatan pasar murah dengan tujuan untuk membantu para pelaku UKM agar dapat memasarkan produknya supaya lebih dikenal oleh masyarakat. Dinas Pertanian juga memberikan bantuan berupa memberikan tempat usaha bagi masyarakat sekitar yang ingin membuka usaha namun tidak mempunyai biaya untuk mendirikan tempat usaha.
5. Aspek pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian yaitu dengan memberikan sosialisasi supaya masyarakat dapat lebih merawat dan mencintai hutan mangrove, karena hutan mangrove juga merupakan sumber penghasilan bagi kehidupan mereka. Upaya sosialisasi yang diberikan yaitu mengenai cara penanaman dan pembibitan pohon mangrove supaya dapat terus bertambah dan terhindar dari pengrusakan. Dinas Pertanian juga berkeinginan supaya para pelaku UKM lebih dapat memasarkan produknya agar usaha mereka dapat lebih maju melalui kegiatan pelatihan yang telah diberikan sebelumnya.

B. Saran

Sesuai hasil penelitian di lapangan mengenai pemberdayaan UKM makanan dan minuman di ekowisata hutan mangrove Wonorejo Surabaya, penulis memberikan beberapa saran dari hasil identifikasi kelemahan yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam mengatasi masalah supaya kedepannya dapat lebih baik lagi. Saran tersebut antara lain:

1. Pemungkinan

Diharapkan sarana akses jalan menuju ekowisata hutan mangrove yang masih rusak dapat segera diperbaiki, jadi bukan hanya akses jalan menuju ke perumahan saja yang diperbaiki.

2. Penguatan

Terkait dengan promosi, diharapkan pemerintah dapat lebih sering melakukan promosi tidak hanya melalui internet dan media online.

3. Perlindungan

Terkait dengan pembangunan perumahan, diharapkan para pengembang perumahan tidak lagi mengembangkan bisnisnya di kawasan hutan mangrove.

4. Penyokongan

Terkait dengan kegiatan pasar murah, diharapkan kegiatan tersebut dapat terus berjalan bahkan diharapkan untuk lebih sering dilakukan.

5. Pemeliharaan

Diharapkan para pelaku UKM dan juga masyarakat sekitar dapat lebih mencintai dan memelihara hutan mangrove karena hutan mangrove dapat memberikan mereka sumber penghasilan dan kelestarian alam.

pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pdf.

Koran opini. 2012. *Lahan konservasi wonorejo digerus perumahan*, (online)

<http://koranopini.com/item/3623-lahan-konservasi-wonorejo-digerus-perumahan>
(diakses pada tanggal 1 Mei 2015)

Mardikanto, Totok dan Poerwoto Subianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya*.pdf.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Tuwo, Ambo. 2011. *Pengolahan Ekowisata Pesisir dan Laut*. Surabaya: Brilian Internasional.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, pdf.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Isbandi Rukminto. 2010. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Anonim. 2004. *Konservasi Mangrove Sebagai Pendukung Sumber Hayati Perikanan Pantai*, Jurnal Litbang Pertanian.

Antarajatim. 2015. *Pembangunan perumahan di wonorejo mengganggu wisatawan*, (online)

www.antarajatim.com/lihat/berita/154963/pembangunan-perumahan-di-wonorejo-mengganggu-wisatawan (diakses pada tanggal 17 Desember 2015)

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Departemen Kehutanan. 2010. *Konsep Pengelolaan Ekowisata Secara Berkelanjutan*. Jurnal Litbang Pertanian. pdf

Hasan, M.Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Alfabeta.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014 tentang *peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam*